



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 90/DJU.2/KP5.8/II/2025 Jakarta, 3 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Apresiasi atas Keberhasilan Lolos Seleksi Artikel di ARUNIKA
Edisi I Tahun 2024

Yth.

Bapak & Ibu (Daftar Nama Terlampir)

di-

Tempat.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu yang namanya tercantum di bawah ini atas keberhasilan dalam menulis artikel dan lolos seleksi Artikel Hukum Hakim Nusantara (ARUNIKA) Edisi I Tahun 2024. Prestasi ini merupakan cerminan dedikasi, kerja keras, dan kompetensi Bapak/Ibu dalam menghasilkan karya ilmiah yang bermutu tinggi, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan menginspirasi rekan-rekan lainnya.

Daftar Nama Penulis yang Lolos Seleksi ARUNIKA Edisi I Tahun 2024

No	Nama	Satuan Kerja	Judul
1	Alvian Fikri Atami	PN Muara Bungo	Wujud Ideal Integritas bagi Hakim
2	Anang Riyan Ramadianto	PN Karanganyar	Proyeksi Transformasi Peradilan: Kode Etik Hakim di Era Kecerdasan Buatan
3	Anwar Rony Fauzi	PN Soe	Membangun Budaya Peradilan Melalui Kepatuhan atas Nilai
4	Andi Ramdhan Adi Saputra	PN Melonguane	Prinsip Dasar dan Etika Hakim dalam Perspektif Islam
5	Apri Yanti	PN Sigli	Relevansi Profesionalisme Hakim dan Keadilan Prosedural Tidak Sempurna dalam Perkara Pidana





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

6	Ari Gunawan	BSDK MA RI	Hakim Sang Optimus Prime
7	Arnos Dheo Vegha Simarmata	PN Tanjung Pinang	Hakim dan Kepaniteraan: Menggapai Keadilan Melalui Peradilan Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang)
8	Catur Alfath Satriya	PN Mandailing Natal	Hakim Sebagai Intelektual Organik
9	Denny Budi Kusuma	PN Muara Teweh	Tantangan Kemandirian Hakim: Menyikapi Tekanan dari Opini Publik di Media Sosial
10	Dewantoro	PN Nunukan	Penegakan Kode Etik Hakim Yang Humanis Sebagai Kunci Pemulihan Peradilan dan Kepercayaan Publik
11	Dharma Setiawan Negara	PN Sidoarjo	Perintah Pembungkaman (<i>Gag Order</i>) oleh Pengadilan Sebelum Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap demi Menjaga Kemandirian Hakim
12	Fahmiron	PN Tangerang	Tantangan dan Implementasi Kode Etik Hakim
13	Firdaus Zainal	PN Jenepono	Hakikat Jabatan Hakim dan Kepaniteraan
14	Gillang Pamungkas	PN Ngabang	Tantangan Implementasi Perma Nomor 8 Tahun 2016 dalam Penegakan Kode Etik Hakim
15	Guntur Pambudi Wijaya	PN Kotabaru	Hakikat Jabatan Hakim Serta Kepaniteraan dan Batasan dalam Kode Etik Serta Penerapannya
16	Handry Argatama Ellion	PN Banyuwangi	Hakikat Jabatan Hakim dalam Perspektif Filosofis
17	Hendrik Dengah	PT Makassar	Perilaku Jujur Hakim Menghasilkan Putusan yang Adil





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

18	Jatmiko Pujo Raharjo	PN Pasir Pengaraian	Sikap Profesional Sebagai Bentuk Akuntabilitas Personal Hakim dalam Menghadapi Opini Publik
19	Jerry Thomas	PN Penajam	Penguatan Prinsip Integritas Hakim melalui Model Pengambilan Keputusan Etis
20	Johannes Edison Haholongan	PN Sidikalang	Menilik Pertanggungjawaban Pidana Hakim dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim
21	M. Zaki Attirmidzi	PN Karanganyar	Eradikasi Kebatilan di Peradilan: Implementasi Kode Etik Hakim dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>
22	Muhammad Mufti	PN Sintang	Hakikat Jabatan Panitera dalam Sistem Peradilan di Indonesia
23	Muhammad Nurulloh Jarmoko	PN Kefamenanu	Tinjauan Aspek Kognitif dalam Kekeliruan Taknis Yudisial: Perspektif Kajian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
24	Muhammad Tasnim	PN Maros	Etika Profesi Hakim dan Semiotika Ketidakadilan
25	Muhammad Taufiq	PN Sungai Penuh	<i>Right To Be Forgotten</i> : Konsep Pemulihan Nama Baik Hakim Indonesia di Mayantara
26	Mukhamad Athfal Rofi Udin	PN Sambas	Profesi Hakim: Sebuah Pekerjaan atau Pengabdian
27	Mula Warman Harahap	PN Tasikmalaya	<i>Iudex, Judge</i> : Memaknai Kode Etik Kemandirian Hakim melalui Sejarah Dua Tradisi Hukum
28	Ni Ageng Djohar	PN Wonosari	Jabatan Hakim: Integritas VS Jaminan Keamanan
29	Romi Hardhika	PN Pare-Pare	Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Meretas Disparitas





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

30	William Edward Sibarani	PN Samarinda	Hakim dan Keadilan: Paradoks dalam Penerapan Putusan yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
31	Wilmar Ibni Rusydan	PN Waingapu	Jabatan Kepaniteraan di Era Disrupsi Digital
32	Yuristyan Pambudi Wicaksana	PN Muara Bungo	Pembaruan Fitur Aplikasi SIPP dalam Rangka Penguatan Kode Etik Jabatan Hakim Bersikap Profesional dan Kode Etik Jabatan Kepaniteraan Tertib Administrasi (Studi Kasus SIPP Pengadilan Negeri Muaro Versi 5.6.4)

* Disusun berdasarkan abjad.

Demikian hal-hal yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo;
2. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar;
3. Ketua Pengadilan Negeri Soe;
4. Ketua Pengadilan Negeri Melonguane;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sigli;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
7. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh;
9. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan;
10. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;
11. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
12. Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto;
13. Ketua Pengadilan Negeri Ngabang;
14. Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru;
15. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi;
16. Ketua Pengadilan Negeri Makassar;
17. Ketua Pengadilan Negeri Pasir

